

MULTI STAKEHOLDER PARTNERSHIP DALAM KERJASAMA SISTER CITY SURABAYA-LIVERPOOL PADA PENDIDIKAN INKLUSI BERKELANJUTAN TAHUN 2022

Oleh: Emo Wisnu Putro¹, Triesanto Rumolo Simanjuntak², Putri Hergianasari³
^{1,2,3} Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

The City of Surabaya has established sister city cooperation with the City of Liverpool in inclusive education. This is in accordance with the 4th SDGs goals. The Purpose of this research is to analyze the multistakeholder partnership in the collaboration of sister City Surabaya-Liverpool in inclusive education in 2022. This research was conducted using a qualitative description method using literature. This study uses the theory of liberalism with the concept of sister city. The result of the study show that sister city collaboration is carried out using a multi-stakeholder partnership approach. This is very important approach in achieving the goals of equitable and inclusive education, promoting the well-being and happiness of all children and being part of the wider society. The conclusion of this study is that the City of Surabaya and the City of Liverpool have implemented inclusive education to provide opportunities for all children to receive the same education without any discrimination. In accordance with the SDGs global agenda, namely No One Left Behind

Key Words : *Cooperation, Multi Stakeholder Partnership, Inclusive Education, Sister City*

Abstrak

Kota Surabaya telah menjalin kerjasama *sister city* dengan Kota Liverpool dalam Pendidikan inklusif. Hal tersebut sesuai SDGs *goals* ke-4. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *multi stake holder partnership* dalam kerjasama *sister city* Surabaya-Liverpool pada Pendidikan inklusi tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme dengan konsep *sister city*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama *sister city* dilakukan dengan menggunakan pendekatan *multi stakeholder partnership*. Hal tersebut merupakan pendekatan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan adil dan inklusif, mempromosikan kesejahteraan dan kebahagiaan semua anak, dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Liverpool memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat pendidikan inklusi berkelanjutan. Kerjasama tersebut dapat menjadi *platform* yang efektif untuk pertukaran pengetahuan, praktik dan sumber daya antara dua kota, serta memperluas jaringan mitra yang terlibat dalam pendidikan inklusi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi berkelanjutan. Edukasi dan kampanye yang terus diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusi sesuai dengan agenda global SDGs yaitu *No One Left Behid*.

Kata Kunci : *Kerjasama, Multi Stakeholder Partnership, Pendidikan Inklusi, Sister City*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan global yang tercantum dalam SDG's di tahun 2030, dicetuskanlah pendidikan inklusi (Safitri et al., 2022). Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan

pendidikan yang sama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus (Imaniah & Fitria, 2018). Hal ini memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman sebayanya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Seperti tujuan berkelanjutan nomor 4, untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan inklusif yang merata bagi semua kalangan (Do et al., 2020).

Kerjasama *Sister City* Surabaya-Liverpool berawal dari *letter of intent* pada tahun 2017 oleh pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan minat terhadap kerjasama tersebut sehingga dapat menjadi *platform* pertukaran budaya dan pendidikan, pengembangan ekonomi, dan keterlibatan sosial (Dinkominfo, 2017). Dari beberapa kerjasama antar berbagai kota, Surabaya menjalin kerjasama dengan Liverpool yang dimulai tahun 2006, dan pada tahun 2018 Surabaya dan Liverpool menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk memperkuat kerjasama tersebut. Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi dan para ahli terkait *sister city*. Berdasarkan Ketryn Berlian Septaralinda, 2021 mengkaji tentang hal yang mendasari Kota Surabaya melakukan kerjasama *sister city* dalam bidang pendidikan yang inklusi dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kota Surabaya dengan Kota Liverpool (Septaralinda, 2021). Penelitian tentang kerjasama *sister city* Kota Surabaya dan Kota Liverpool juga ditulis oleh Danang Adi Putranto, penelitian tersebut mengkaji latar belakang pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah Kota Liverpool bekerjasama pada program *sister city* dengan menggunakan teori kerjasama internasional (Putranto, 2019). Rasta Hayuning Dzazira mengkaji tentang Implementasi paradiplomasi *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyusu. Penelitian berfokus bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Surabaya dan Kitakyusu menggunakan teori kerjasama internasional (Rasta Hayuning, 2022).

Konsep asli dari kota kembar atau *sister city* adalah program pertukaran antar kota yang pertama kali diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower pada tahun 1956. Program ini awalnya dikenal sebagai *People-to-People* program dan bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara melalui pertukaran pelajar, kebudayaan, dan pengalaman. Ide ini kemudian berkembang menjadi program *sister city*, di mana dua kota dari negara yang berbeda sepakat untuk menjalin hubungan erat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan budaya. Melalui program ini, kedua kota tersebut dapat mempererat hubungan dan mempromosikan perdamaian dan pemahaman internasional. Pertukaran antara kota-kota tersebut harus berlangsung dalam kerangka saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling memperkaya. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan budaya, diharapkan dapat terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang saling menguntungkan antara kedua kota yang menjadi kota kembar (Nur Alam & Arfin Sudirman, 2020).

Kerjasama *sister city* dimulai dengan penandatanganan perjanjian antara dua kota yang mengikat bahwa mereka akan saling mendukung dan mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang. Selanjutnya, kedua kota akan mengadakan pertukaran delegasi untuk mempererat hubungan persahabatan dan membangun kesepahaman. Dalam kerjasama *sister city*, kedua kota biasanya berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu, mengadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa, dan juga mempromosikan pariwisata dan kebudayaan masing-masing kota. Kerjasama ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk investasi dan perdagangan (Rusandi, 2017). Contoh kerjasama *sister city* yang terkenal adalah antara kota Kyoto di Jepang dengan Kota Florence di Italia, yang berbagi warisan budaya dan sejarah. Selain itu, kota-kota seperti New York dan Paris, Jakarta dan Beijing, serta Berlin dan Moskow juga memiliki kerjasama *sister city* yang kuat dalam berbagai bidang (warta.jogjakota, 2022).

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme. Sebagai teori hubungan internasional, liberalisme menekankan pada pentingnya kerjasama dan saling ketergantungan antara negara-negara dalam mengatasi masalah-masalah global (Meise, 2018). Teori liberalisme menyatakan bahwa negara-negara dapat mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi mereka dengan cara saling bekerjasama dan mempromosikan kebebasan individu serta keadilan sosial. Liberalisme juga

menekankan pentingnya hukum internasional dan organisasi internasional sebagai sarana untuk mengatasi masalah-masalah global seperti perdagangan internasional, keamanan internasional, dan lingkungan hidup. Dalam pandangan liberalisme, negara-negara tidak selalu bersaing dan bertentangan satu sama lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya, namun dapat pula berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Oleh karena itu, liberalisme menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam hubungan internasional, serta menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik (Saeri, 2012).

Penelitian ini menggunakan konsep SDGs. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Hadiwijoyo & Anisa, 2019). Tujuan ini untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, serta mempromosikan kesempatan pembelajaran seumur hidup bagi semua orang (sdgs.un.org, 2016). SDG's goal ke 4 mencakup beberapa target khusus, seperti memastikan bahwa semua anak dapat menempuh Pendidikan yang berkualitas, memastikan akses yang sama bagi semua orang ke pendidikan teknis, vokasional, dan pendidikan tinggi. (SDGs, 2018). Tujuan SDGs *goal* ke 4 tidak hanya berkaitan dengan peningkatan tingkat literasi, tetapi juga mempromosikan pembelajaran seumur hidup yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat, memastikan kesetaraan gender dalam pendidikan, dan mempromosikan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dan budaya perdamaian (Kementrian PPN & Bappenas, 2020).

Dalam rangka mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama antar negara dan sektor. Sehingga penting peranan *multistakeholder partnership* (Stott, 2022) dalam upaya untuk memastikan akses dan kesetaraan dalam pendidikan dan memperkuat sistem pendidikan yang berkualitas serta relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat, berikut adalah beberapa target SDGs ke 4 "Pendidikan Berkualitas":

1. Memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil, dan berkualitas yang menghasilkan hasil belajar yang relevan dan efektif.
2. Memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan memiliki akses ke pengembangan, perawatan, dan pendidikan anak usia dini berkualitas sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar.
3. Memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknis, vokasional, dan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas.
4. Meningkatkan secara substansial jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan vokasional, untuk pekerjaan, pekerjaan layak, dan wirausaha.
5. Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan vokasional untuk orang yang rentan, termasuk orang dengan disabilitas, orang asli, dan anak-anak yang rentan.
6. Memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai literasi dan numerasi yang memadai.
7. Pengetahuan dan ketrampilan dari setiap peserta didik harus dipastikan. Hal ini menjadi penting sebagai dasar untuk melakukan promosi pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya aspek pendidikan yang memiliki andil besar terhadap pembangunan berkelanjutan tetapi juga pengakuan hak asasi manusia, adanya kesetaraan gender, budaya damai non-fisik, kewarganegaraan global, pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. (Safitri et al., 2022).

Pendidikan inklusi menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus serta terus dikembangkan oleh kedua belah pihak. Sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan multi stakeholder partnership dalam kerjasama Sister City Surabaya-Liverpool pada pendidikan inklusi berkelanjutan tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan dengan judul yang diangkat oleh penulis, maka unit amatanya adalah kerjasama Surabaya dan Liverpool, sedangkan unit analisisnya adalah *mutlistakeholder partnership* dalam kerjasama *sister city* Surabaya dan Liverpool dalam Pendidikan inklusif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, baik dari buku-buku, dokumen-dokumen, ataupun media masa dan elektronik maupun tulisan tulisan yang telah ada dan relevan dengan judul yang diangkat penulis (Moleong, 2014). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, dan bisa didapatkan dari jurnal, dan situs-situs internet yang kredibel (B. Miles & Huberman, 1994).

PEMBAHASAN

Kerjasama *Sister City* Kota Surabaya dan Kota Liverpool dalam Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali. Dalam pendidikan inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berbeda, baik itu fisik, intelektual, maupun sosial-emotional, diajarkan bersama-sama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus (Alfikri et al., 2022). Pendidikan inklusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, di mana perbedaan dan keunikan setiap individu dihargai dan dipromosikan. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak lain yang terlibat dalam pendidikan anak. Munculnya pendidikan inklusi merujuk pada semakin kuatnya kebutuhan akan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua anak, tanpa terkecuali (Sutarya, 2019). Pendidikan inklusi berkembang dari kesadaran bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berbeda sering diabaikan atau dikesampingkan dalam sistem pendidikan tradisional, dan bahwa mereka membutuhkan lingkungan pendidikan yang lebih responsif dan mendukung (Hanjarwati & Aminah, 2014). Pendidikan inklusi juga muncul sebagai hasil dari perubahan sosial dan politik yang lebih luas, di mana masyarakat semakin menyadari pentingnya inklusi dan keragaman dalam semua aspek kehidupan (Mubarok, 2022). Selain itu, advokasi dari kelompok-kelompok orang tua, guru, dan organisasi-organisasi kebijakan publik telah memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan inklusi sebagai prioritas dalam sistem Pendidikan (Yulianto, 2014).

Kerjasama *sister city* yang terjalin antara Surabaya-Liverpool dimulai dari aspek Pendidikan pada tahun 2011 ketika Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini, mengunjungi Liverpool dalam rangka mencari potensi kerjasama antara kedua kota. Salah satu bidang kerjasama yang dibahas adalah pendidikan. Setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Liverpool, Wali Kota Surabaya melihat banyak kesamaan antara sekolah di Surabaya dan Liverpool, termasuk masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Dari situ, terbentuklah gagasan untuk menjalin kerjasama Sister City antara Surabaya dan Liverpool dalam bidang Pendidikan (Septaralinda, 2021). Pada tahun 2012, delegasi dari Liverpool mengunjungi Surabaya untuk membahas lebih lanjut kerjasama *sister city*. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa salah satu fokus kerjasama adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan tenaga pendidik di kedua kota. Selain itu, kerjasama juga akan berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah itu, terjalinlah kerjasama yang konkret antara Surabaya dan Liverpool dalam bidang pendidikan. Salah satu hasil kerjasama tersebut adalah program pertukaran pelajar dan tenaga pendidik antara sekolah di Surabaya dan Liverpool. Melalui program ini, siswa dan tenaga pendidik dari kedua kota dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia pendidikan. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam hal penyediaan bantuan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Liverpool membantu Surabaya dalam meningkatkan kualitas

pendidikan dengan memberikan bantuan dalam penyusunan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan anak didik di Surabaya. Selain itu, Liverpool juga memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama *sister city* Surabaya-Liverpool dalam bidang pendidikan terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua kota. Kerjasama ini menjadi bukti bahwa kota-kota di seluruh dunia dapat saling belajar dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas Pendidikan (Septaralinda, 2021).

Kota Surabaya yang telah melaksanakan pendidikan inklusi memberikan peluang bagi semua anak untuk mengenyam pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini tercermin dalam upaya Kota Surabaya untuk memperluas aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan inklusif, sehingga semua anak dapat menerima pendidikan berkualitas yang diinginkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kota Surabaya adalah dengan menempatkan guru-guru inklusi di setiap sekolah dasar dan menengah, serta melengkapi mereka dengan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berbeda. Selain itu, Kota Surabaya juga telah memperluas sarana dan prasarana pendidikan inklusif, seperti fasilitas pendukung aksesibilitas, peralatan pendidikan khusus, dan lingkungan pendidikan yang responsif dan inklusif. Sehingga membantu memastikan bahwa semua anak dapat mengakses dan memanfaatkan lingkungan pendidikan yang sama dengan baik, tanpa terkecuali. Dengan demikian, pendidikan inklusi di Kota Surabaya memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar dan tumbuh bersama-sama, tanpa diskriminasi. Hal ini juga membantu mempromosikan inklusi sosial dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 tahun 2018 yang berisi tentang pendidikan inklusi dan peningkatan mutu Pendidikan (Ramadhan, 2020).

Multi Stakeholder Partnership dalam Kerjasama Sister City Surabaya-Liverpool pada Pendidikan Inklusif

Pemerintah Inggris telah menetapkan beberapa kewajiban hukum bagi penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus di antaranya:

1. *The Equality Act 2010*: Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi berkebutuhan khusus dari diskriminasi di tempat kerja, dalam pendidikan, dan di tempat-tempat umum lainnya.
2. *Children and Families Act 2014*: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan yang terintegrasi dan memadai bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
3. *Special Educational Needs and Disability (SEND) Code of Practice*: Panduan ini memberikan pedoman bagi sekolah, penyelenggara pendidikan anak usia dini, otoritas lokal dan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dan remaja dengan kebutuhan khusus.
4. *Accessibility Regulations 2018*: Peraturan ini mensyaratkan bahwa situs *web* sekolah dan penyelenggara pendidikan lainnya harus memenuhi persyaratan aksesibilitas yang diatur oleh undang-undang.
5. *Statutory Guidance on Supporting Pupils at School with Medical Conditions*: Pedoman ini memberikan arahan bagi sekolah dalam memberikan dukungan yang memadai bagi siswa dengan kondisi medis yang memerlukan perawatan khusus selama berada di sekolah (Septaralinda, 2021).

Dengan adanya kewajiban hukum tersebut di Inggris diharapkan untuk memberikan dukungan yang terintegrasi dan memadai bagi berkebutuhan khusus. Sehingga mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memadai, serta memaksimalkan potensi mereka. Sekolah inklusi di Liverpool dikenal dengan istilah SEND, yang merupakan singkatan dari *Special Educational Needs and Disabilities*. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus atau cacat, baik fisik maupun intelektual, dan memerlukan dukungan khusus

untuk belajar dan berkembang dengan baik. Sekolah inklusi di Liverpool biasanya memiliki staf dan fasilitas yang terlatih dan terqualifikasi untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan SEND, dan mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan pendekatan inklusif, sekolah SEND di Liverpool bertujuan untuk memberikan dukungan yang memadai bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus sehingga mereka dapat mengakses pendidikan yang setara dengan teman-teman mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini, sekolah SEND di Liverpool sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak dengan SEND mendapatkan pendidikan yang setara. (Vickerman & Maher, 2018).

Special Education Needs Coordination (SENCo) merujuk pada peran koordinasi dan pengawasan terhadap penyediaan pendidikan kebutuhan khusus (*Special Education Needs/SEN*) di sebuah sekolah atau *setting* pendidikan. SENCo biasanya adalah seorang guru atau profesional pendidikan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa dengan SEN diidentifikasi, dinilai, dan diberikan dukungan dan sumber daya yang sesuai untuk berhasil dalam pendidikan mereka (Layton, 2005). Peran SENCo melibatkan bekerja sama dengan guru, orang tua, dan profesional lain untuk mengembangkan Rencana Pendidikan Individu (*Individual Education Plans/IEPs*) dan memastikan bahwa akomodasi dan modifikasi yang sesuai dilakukan untuk siswa dengan SEN. Mereka juga menjalin hubungan dengan lembaga eksternal seperti layanan sosial dan penyedia kesehatan untuk memastikan bahwa siswa menerima dukungan dan perawatan yang diperlukan di luar lingkungan sekolah. Selain itu, SENCo juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik sekolah inklusif dan memenuhi kebutuhan semua siswa, tanpa memandang kemampuan atau kecacatan mereka (Boesley & Crane, 2018). Mereka bekerja untuk menciptakan budaya inklusi dan mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang SEN di antara seluruh *staf* dan siswa (Pearson et al., 2015).

SEN *Support* merupakan level pertama pada layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Inggris. Ini merujuk pada dukungan yang diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus di dalam kelas reguler. Pada tingkat SEN *Support*, siswa menerima dukungan tambahan dari guru dan staf sekolah untuk membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dukungan ini termasuk strategi pembelajaran yang disesuaikan, pengajaran kelompok kecil, atau sumber daya yang disesuaikan. Proses untuk mendapatkan dukungan ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan siswa melalui evaluasi atau observasi, yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah. Setelah identifikasi kebutuhan, guru dan staf sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa dan ahli terkait untuk mengembangkan rencana pendidikan individu (*Individual Education Plans/IEPs*) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jika dukungan tambahan pada tingkat SEN *Support* tidak mencukupi, maka dapat dipertimbangkan untuk pindah ke tingkat dukungan yang lebih tinggi, yaitu SEN *Support* Plus atau bahkan mengajukan permohonan untuk penempatan di sekolah khusus (*special school*) (Avramidis et al., 2000).

EHC *Plan* (*Education, Health and Care Plan*) atau Rencana EHC merupakan sebuah dokumen hukum di Inggris yang mencakup kebutuhan, dukungan, dan tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. EHC *Plan* mencakup informasi detail tentang kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial anak, serta rencana dukungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. EHC *Plan* memberikan dukungan yang disesuaikan dan terkoordinasi kepada anak berkebutuhan khusus, dengan tujuan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam pendidikan. EHC *Plan* berfokus pada kebutuhan dan tujuan anak, dan menentukan dukungan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam EHC *Plan*, ada penjelasan tentang dukungan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan anak. Dokumen ini diperbarui secara teratur dan melibatkan kolaborasi antara orang tua, anak, dan lembaga terkait seperti sekolah, otoritas lokal, dan ahli kesehatan (Robinson et al., 2018).

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan inklusi didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi

Siswa/I Disabilitas dan Memiliki Kapabilitas Istimewa (Munawwaroh, 2018). Peraturan ini menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif, tanpa diskriminasi apapun. Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus, termasuk anak-anak dengan disabilitas, dapat mengakses pendidikan yang setara dengan teman-teman mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas dapat belajar di sekolah umum dan mendapatkan dukungan yang memadai dari guru, staf, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan beberapa kebijakan dan program, seperti pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, pelatihan untuk guru dan staf sekolah, serta pengembangan kurikulum inklusif. Meskipun pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, namun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus (Khotimah & Mengenai Keberadaan Sekolah, 2019).

Di Surabaya terdapat tiga elemen dalam layanan pendidikan inklusi yaitu Sekolah Luar Biasa, Sekolah Inklusi dan Guru pendamping Khusus. Berikut penjelasan secara singkat tentang Guru Pendamping Khusus, serta Sekolah Inklusi dan Sekolah Luar Biasa. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki tugas khusus dalam memberikan pendampingan dan bimbingan pada siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Untuk menjadi seorang GPK, seseorang membutuhkan latar belakang pendidikan yang memadai, seperti lulusan jurusan Pendidikan Luar Biasa atau program pendidikan yang setara (Rahmaniar, 2016). Lulusan Pendidikan Luar Biasa atau program setara biasanya dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang efektif bagi ABK. Selain itu, seorang GPK juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang psikologi dan rehabilitasi, serta mampu berkomunikasi dengan orang tua, guru, dan para profesional terkait lainnya dalam upaya memberikan dukungan yang terbaik bagi ABK. Namun, di samping latar belakang pendidikan formal, menjadi seorang GPK juga membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang terus dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan tambahan.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi dan menerima siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus (Anak Berkebutuhan Khusus/ABK) ke dalam kelas reguler, sehingga mereka dapat belajar bersama dengan siswa lain yang memiliki kebutuhan pendidikan yang beragam (Darma & Rusyidi, 2015). Dalam sekolah inklusi, ABK diberikan kesempatan yang sama dengan siswa lain untuk mengakses kurikulum dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial, kesetaraan, dan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Sekolah inklusi biasanya melibatkan guru-guru dan staf sekolah yang terlatih dan terampil dalam bekerja dengan siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus (Ariastuti & Herawati, 2016). Mereka dapat memberikan dukungan dan layanan khusus yang dibutuhkan siswa tersebut, seperti dukungan belajar tambahan, modifikasi dalam penilaian, dan dukungan perilaku atau kesehatan mental. Selain itu, sekolah inklusi juga dapat bekerja sama dengan para profesional terkait lainnya, seperti psikolog, terapis, atau dokter, dalam rangka memberikan dukungan yang terbaik bagi ABK. Konsep inklusi di sekolah bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, serta membantu mengurangi diskriminasi dan stigma yang sering dialami oleh ABK. Dengan menghadirkan sekolah inklusi, diharapkan para siswa dapat belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan, dan belajar bersama dengan teman sebaya. SLB merupakan lembaga pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan khusus untuk siswa dengan berbagai jenis kebutuhan pendidikan, seperti kebutuhan pendidikan khusus fisik, kebutuhan pendidikan khusus mental, atau kebutuhan pendidikan khusus gabungan (Haryono et al., 2015). SLB dilengkapi dengan fasilitas dan program yang didesain khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan khusus para siswa, termasuk dukungan teknologi dan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan fisik. Di SLB, siswa dapat memperoleh bimbingan dan pembelajaran yang disesuaikan

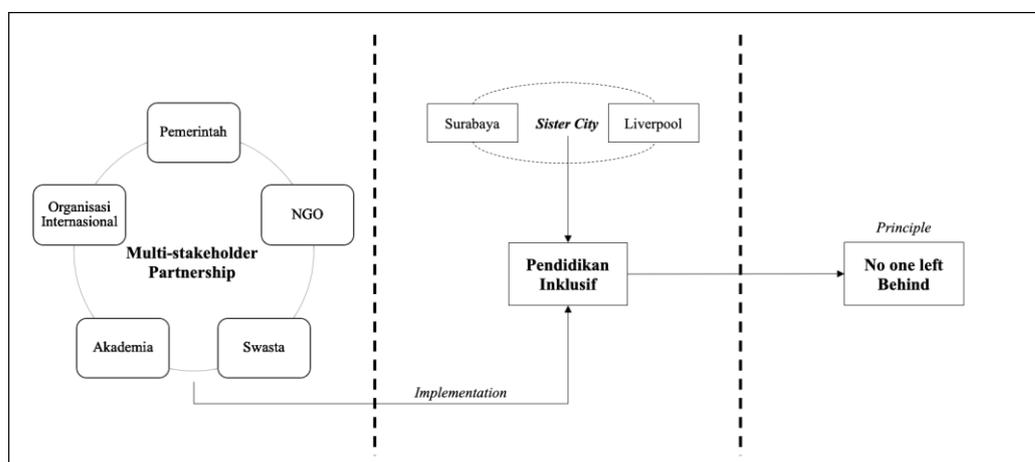
dengan kebutuhan mereka, serta dukungan yang terintegrasi dari para profesional terkait, seperti psikolog, terapis, atau dokter (Astuti et al., 2021). Sekolah Luar Biasa di Indonesia dikelola oleh pemerintah atau swasta dan diselenggarakan dalam beberapa jenjang, mulai dari Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar (SLB-D) hingga Sekolah Luar Biasa Tingkat Menengah (SLB-M). SLB merupakan sarana yang penting dalam memenuhi hak pendidikan bagi ABK, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan dan perhatian khusus dalam proses pembelajaran. Selain memberikan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, SLB juga berperan dalam memberikan dukungan kepada orang tua dan keluarga siswa dalam memahami dan mengatasi tantangan dalam mendidik anak dengan kebutuhan Pendidikan khusus (Zubaidah & Utomo, 2021).

Tabel 1. Persamaan Layanan Pendidikan Inklusi di Surabaya dan Liverpool

Layanan	Surabaya	Liverpool
Pendidikan Inklusi	Sekolah Inklusi	SEND (<i>Special Education Needs and Disability</i>)
Pendidikan Eklusih Anak Berkebutuhan Khusus	Sekolah Luar Biasa	EHC (<i>Education, Health and Care</i>) Plan
Penyedia Tenaga Pendamping Khusus	GPK (Guru Pendamping Khusus)	SENCO (<i>Special Education Needs Coordination</i>)

Sumber: (Septaralinda, 2021)

Tantangan dalam implementasi SDGs di Indonesia antara lain memastikan inklusi agar tidak ada yang tertinggal; integrasi semua peserta dalam program; menyelaraskan prioritas pemerintah dan NGO. Urgensi *multi stakeholder partnership* adalah untuk mengimplementasikan SDGs. Sehingga mendorong *stakeholder* dan pemerintah untuk mencoba memulai kemitraan di tingkat nasional dan lokal. Ini adalah cara kerja, pendekatan dan institusi untuk dicoba dan dikembangkan sebagai upaya *No One Left behind*. *Multi stakeholder partnership* memiliki kapasitas untuk mempercepat dan meningkatkan aksi dan program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada *sister city* antara Kota Surabaya-Kota Liverpool, dalam mewujudkan Pendidikan inklusif sesuai dengan SDGs tujuan ke 4 yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Sehingga dilakukan dengan kerjasama kolaborasi antar pemangku kepentingan. Berikut peran tiap agen dalam *multi stakeholder partnership sister city* Kota Surabaya-Kota Liverpool dalam mewujudkan pembangunan inklusif.



Gambar 1. Multi stakeholder Partnership dalam Sister City Surabaya-Liverpool

Sumber: desain penulis

Dari gambar di atas, maka masing-masing agen mempunyai peran dalam mewujudkan sister city Surabaya-Liverpool dalam Pendidikan inklusi. Berikut merupakan tabel peran masing-masing agen.

Tabel 2. Peran Masing-Masing Agen

No	Agen	Peran
1	Pemerintah	Pemerintah Liverpool: membuat kebijakan <i>The Equality Act 2010, Children and Families Act 2014, Special Educational Needs and Disability (SEND) Code of Practice, Accessibility Regulations 2018, Statutory Guidance on Supporting Pupils at School with Medical Conditions</i> Pemerintah Surabaya: membuat kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa/I Disabilitas dan Memiliki Kapabilitas Istimewa, terdapat tiga elemen dalam layanan pendidikan inklusi yaitu Sekolah Luar Biasa, Sekolah Inklusi dan Guru pendamping Khusus.
2	NGO	psikolog, terapis, atau dokter, organisasi-organisasi kebijakan <i>public Special Education Needs Coordination (SENCo)</i>
3	Sektor Swasta	Menyediakan sekolah SLB
4	Akademia	kolaborasi antara guru yang terlibat dalam pendidikan anak, advokasi dari kelompok-kelompok orang tua, guru, dan profesional pendidikan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa dengan SEN diidentifikasi, dinilai, dan diberikan dukungan dan sumber daya yang sesuai untuk berhasil dalam pendidikan mereka
5	Organisasi Internasional	SDGs-UNDP

Sumber: olah data penulis

PENUTUP

Kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Liverpool memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat pendidikan inklusi berkelanjutan. Kerjasama tersebut dapat menjadi *platform* yang efektif untuk pertukaran pengetahuan, praktik dan sumber daya antara dua kota, serta memperluas jaringan mitra yang terlibat dalam pendidikan inklusi. Implementasi pendidikan inklusi berkelanjutan dalam kerjasama *Sister City* Surabaya-Liverpool menghadapi tantangan dan hambatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta hambatan struktural dapat mempengaruhi efektivitas implementasi pendidikan inklusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut. Partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum, sangat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusi berkelanjutan. Dalam Kerjasama *Sister City*, peran aktif dan kolaboratif dari semua pihak diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan inklusi dan mengatasi hambatan yang ada.

Pentingnya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi pendidikan inklusi dalam kerjasama *Sister City* Surabaya-Liverpool. Evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan dapat

membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta peluang yang ada dalam pendidikan inklusi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan pendidikan inklusi di masa mendatang. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi berkelanjutan. Edukasi dan kampanye yang terus diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pendidikan inklusif dapat menjadi berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Dalam rangka meningkatkan pendidikan inklusi berkelanjutan melalui kerjasama *sister city* Surabaya-Liverpool, rekomendasi dapat dilakukan dalam hal peningkatan sumber daya, kebijakan yang mendukung, pelibatan masyarakat yang lebih luas, dan pemantauan yang terus-menerus. Dengan demikian upaya bersama dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan akan membawa dampak positif bagi pendidikan inklusi dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan agenda global SDGs yaitu *No One Left Behind*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7954–7966. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I6.7545>
- Ariastuti, R., & Herawati, V. D. (2016). Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.30653/002.201611.7>
- Astuti, W., Friansah, D., & Salman, E. (2021). Pengembangan Modul Pembelajaran Adaptif bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Lubuklinggau. *SJS: Silampari Journal Sport*, 1(2), 77–99. <http://www.jurnal.lp3mkil.or.id/index.php/SJS/article/view/149>
- Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. *Teaching and Teacher Education*, 16(3), 277–293. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(99\)00062-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(99)00062-1)
- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. 1–352.
- Boesley, L., & Crane, L. (2018). 'Forget the Health and Care and just call them Education Plans': SENCOs' perspectives on Education, Health and Care plans. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 18, 36–47. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12416>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I2.13530>
- Dinkominfo. (2017, September 7). *SURABAYA MATANGKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN LIVERPOOL*. Surabaya.Go.Id. <https://surabaya.go.id/id/berita/38405/surabaya-matangkan-kerjasama-si>
- Do, D. N. Mac, Hoang, L. K., Le, C. M., & Tran, T. (2020). A Human Rights-Based Approach in Implementing Sustainable Development Goal 4 (Quality Education) for Ethnic Minorities in Vietnam. *Sustainability*, 12(10), 4179. <https://doi.org/10.3390/SU12104179>
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *SDGs, Paradigma Baru Pembangunan Global* (Pertama). Yogyakarta: Spektrum Nusantara.
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. *INKLUSI*, 1(2), 221–248. <https://doi.org/10.14421/IJDS.010206>
- Haryono, H., Syaifudin, A., & Widiastuti, S. (2015). EVALUASI PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32(2). <https://doi.org/10.15294/JPP.V32I2.5057>
- Imaniah, I., & Fitria, N. (2018). Inclusive Education for Students with Disability. *SHS Web of Conferences*, 42, 00039. <https://doi.org/10.1051/SHSCONF/20184200039>

- Kementrian PPN, & Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia* (V. Yulaswati, J. Rizal Primana, Oktorialdi, D. Sadia Wati, & Maliki, Eds.; II). Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Khotimah, H., & Mengenai Keberadaan Sekolah, K. (2019). Analisis Kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(2). <https://doi.org/10.30762/REALITA.V17I2.1860>
- Layton, L. (2005). Special educational needs coordinators and leadership: a role too far? *Support for Learning*, 20(2), 53–60. <https://doi.org/10.1111/J.0268-2141.2005.00362.X>
- Meise, J. W. (2018, February 18). *Introducing Liberalism in International Relations Theory*. Wwww.e-Ir.Info. <https://www.e-ir.info/2018/02/18/introducing-liberalism-in-international-relations-theory/>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi 1 re). Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, N. '. (2022). Pemenuhan Hak Anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 21–46. <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2022.12.2.21-46>
- Munawwaroh, L. (2018). Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak. *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 173–186. <https://doi.org/10.14421/AL-BIDAYAH.V10I2.167>
- Nur Alam, G., & Arfin Sudirman, dan. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 31–50. <https://doi.org/10.26593/JIHI.V16I1.3365.31-50>
- Pearson, S., Mitchell, R., & Rapti, M. (2015). 'I will be "fighting" even more for pupils with SEN': SENCOs' role predictions in the changing English policy context. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15(1), 48–56. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12062>
- Putranto, D. A. (2019). *LATAR BELAKANG KERJASAMA PROGRAM SISTER CITY KOTA SURABAYA – LIVERPOOL*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Rahmaniar, F. A. (2016). THE ROLE OF SHADOW TEACHER ON GIVING EDUCATION SERVICE FOR SPECIAL STUDENTS IN THE INCLUSIVE SCHOOL SD N GIWANGAN YOGYAKARTA. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 5(12), 1263.
- Ramadhan, A. C. (2020). *Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Surabaya)* [Universitas Airlangga]. <http://lib.unair.ac.id>
- Rasta Hayuning, D. (2022). *IMPLEMENTASI PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA MELALUI KERJASAMA SISTER CITY DENGAN KITAKYUSHU JEPANG*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Robinson, D., Moore, N., & Hooley, T. (2018). Ensuring an independent future for young people with special educational needs and disabilities (SEND): a critical examination of the impact of education, health and care plans in England. *Https://Doi.Org/10.1080/03069885.2017.1413706*, 46(4), 479–491. <https://doi.org/10.1080/03069885.2017.1413706>
- Rusandi, R. (2017). KERJASAMA SISTER CITY JAKARTA-BERLIN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN PADA TAHUN 2011-2014. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(4), 1255–1270.
- Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*, 3(2), 1–19.
- Safitri, A. O., Dwi Yuniarti, V., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V6I4.3296>

- SDGs. (2018). *Sustainable Development Goals*. Sustainable Development Goals. <https://www.sdg2030indonesia.org/#modalIconDefinition>
- sdgs.un.org. (2016). *THE 17 GOALS*. Sdgs.Un.Org. <https://sdgs.un.org/goals>
- Septaralinda, K. B. (2021). IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY SURABAYA – LIVERPOOL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INKLUSI DI SURABAYA [Universitas Muhammadiyah Malang]. In *UMM Institutional Repository* (Vol. 18, Issue 3). <https://doi.org/10.1007/S11067-018-9419-9>
- Stott, L. (2022). *Partnership and Transformation; The Promise of Multi-stakeholder Collaboration in Context*. Routledge. www.routledge.com/
- Sutarya, M. (2019). *Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta*. Institut PTIQ.
- Vickerman, P., & Maher, A. (2018). *Teaching Physical Education to Children with Special Educational Needs and Disability*. Routledge. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Jc1mDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT11&dq=Inclusive+schools+in+Liverpool+are+known+as+SEND,+which+stands+for+Special+Educational+Needs+and+Disabilities&ots=3yIPQ-7MfO&sig=BMYO0nWBOsNg-UpuNRK_P4IxPvts&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- warta.jogjakota. (2022, March 25). *Polandia Jajaki Kerja Sama Sister City dengan Yogya*. Warta.Jogjakota.Go.Id. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/20223>
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. *INKLUSI*, 1(1), 19–38. <https://doi.org/10.14421/IJDS.010102>
- Zubaidah, & Utomo, P. (2021). Pola Pembelajaran dalam Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus (Tunagrahita) di Sekolah Luar Biasa. *JAMBURA Guidance and Counseling Journal*, 2(2), 62–73. <https://doi.org/10.37411/JGCJ.V2I2.950>